

## REFLEKSI NILAI KEMANUSIAAN DI ORGANISASI NAHDLATUL WATHAN PANCOR NUSA TENGGARA BARAT

Verbena Ayuningsih Purbasari<sup>1</sup>, R.Samidi<sup>2</sup>, Kenlies Era Rosalina Marsudi<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Ekonomi Syariah, FEBI, IAIN Ponorogo

<sup>2</sup>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Pancasakti Tegal

<sup>1</sup>Email: [verbenaayuningsihpurbasari@iainponorogo.ac.id](mailto:verbenaayuningsihpurbasari@iainponorogo.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk refleksi nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan sila ke-2 Pancasila di organisasi Nahdlatul Wathan Pancor, Nusa Tenggara Barat. Masalah difokuskan pada bentuk refleksi nilai kemanusiaan di bidang pendidikan dan sosial. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian dipilih melalui teknik purposive, yakni Pengurus Besar Organisasi Nahdlatul Wathan Pancor. Penelitian dilaksanakan di Organisasi Nahdlatul Wathan Pancor. Data penelitian dikumpulkan berdasarkan hasil dokumentasi, wawancara, dan observasi. Keabsahan data diperiksa melalui teknik triangulasi, sedangkan data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk implementasi nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan sila ke-2 Pancasila di Organisasi Nahdlatul Wathan Pancor dalam bidang pendidikan, yakni melalui pendirian sekolah/madrasah dari jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, serta memberikan program bantuan beasiswa. Sedangkan dalam aspek sosial meliputi pendirian panti asuhan, Pusat Kesehatan Pesantren (Poskestren) dan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren).

**Kata Kunci:** Pancasila, nilai kemanusiaan, Nahdlatul Wathan Pancor.

### Abstract

*This study aims to determine the form of reflection of human values based on the second principle of Pancasila in the Nahdlatul Wathan Pancor organization, Nusa Tenggara Barat. The problem is focused on the form of reflection of human values in the educational and social fields. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. The research subjects were selected through a purposive technique, namely the Executive Board of the Nahdlatul Wathan Pancor Organization. The research was conducted at the Nahdlatul Wathan Pancor Organization. Research data was collected based on the results of documentation, interviews, and observations. The validity of the data was checked through the triangulation technique, while the data was analyzed using the Miles and Huberman interactive analysis model, which began with data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions/verification. The results showed that the form of implementing human values based on the 2nd precepts of Pancasila in the Nahdlatul Wathan Organization Pancor was in the field of education, namely through the establishment of schools/madrasas from elementary to university levels, as well as providing scholarship assistance programs. Meanwhile, the social aspect includes the establishment of orphanages, Islamic Boarding School Health Centers (Poskestren) and Islamic Boarding School Cooperatives (Kopontren).*

**Keywords:** Pancasila, humanity value, Nahdlatul Wathan Pancor.

## PENDAHULUAN

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan realitas sejarah dan penjaga semangat zaman yang dilaluinya. Realitas sejarah terbentuk oleh proses dan waktu yang panjang di wilayah nusantara, yang kemudian mendorong munculnya rumusan ideologi baru di tengah pertarungan ideologi yang dialami oleh Indonesia pada jaman itu. Pancasila lahir menjadi sebuah ideologi ideal dan alternatif di tengah arus pertarungan antara kapitalisme dan sosialisme. Keberadaannya mampu menunjukkan eksistensi dan kekuatan kebangsaan bagi generasi muda bangsa. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah

menggambarkan secara jelas kekuatan bangsa Indonesia yang mampu lepas dari belenggu penjajahan dan penindasan nilai kemanusiaan. Disebutkan dalam alinea pertamanya bahwa sebuah kemerdekaan memiliki arti penting bagi setiap bangsa di dunia sebagai wujud dari hak yang sangat mendasar, dan dijadikan sebagai kerangka dalam memuliakan nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan (Latif, 2011). Trauma oleh sebab praktik penjajahan yang terjadi selama ratusan tahun di Indonesia, mengajarkan kepada kita begitu berharganya nilai kemanusiaan sekaligus sebagai pengingat dan penjaga sikap agar tidak terulang kembali peristiwa yang serupa.

Rasa senasib dan sepenanggungan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme telah menjadi inspirasi bagi para *Founding Fathers* untuk segera mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Sebab, kemerdekaan menjadi gerbang utama yang menunjukkan semangat serta kesadaran bangsa Indonesia bahwa setiap individu berhak untuk bebas, merdeka dan dijunjung nilai-nilai kemanusiaannya. Spirit kemerdekaan untuk menjunjung nilai-nilai kemanusiaan kemudian dituangkan dalam sila ke-2 Pancasila, yakni “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Kemanusiaan merupakan konsep yang menekankan adanya sebuah kebajikan yang tentu di dalamnya mengandung nilai-nilai kepedulian terhadap hak-hak manusia sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalankan prinsip moral bagi kehidupan (Samho, 2012).

Nilai kemanusiaan merupakan salah satu tanda yang menunjukkan keberadaban suatu masyarakat. Masyarakat beradab dalam konteks pemahaman John Locke dikenalkan dengan istilah masyarakat sipil (*civil society*). Dalam pandangan pribadi John Locke, masyarakat beradab setidaknya memiliki 3 karakteristik, diantaranya: *Pertama*, adanya kepercayaan yang terbentuk di antara anggota masyarakat, dengan keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan kesetaraan pada setiap manusia. Dalam hal ini, secara individu setiap manusia satu sama lain memiliki hak yang sama dan adil. *Kedua*, terbentuknya konsensus atau kontrak sosial antar kelompok masyarakat dan konsensus antara masyarakat dengan lembaga yang mengelola keamanan serta ketertiban masyarakat. Implikasi dari karakteristik ini adalah terbentuknya sebuah sistem peraturan yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat sebagai media untuk mewujudkan tertib sosial. *Ketiga*, masyarakat beradab adalah masyarakat yang mampu melindungi dan mendorong proses kemandirian individu serta mengutamakan sikap toleransi terhadap keragaman kepercayaan (Samho, 2012). Dengan pengertian lain, bahwa masyarakat beradab adalah masyarakat yang toleran dan peduli terhadap proses pribadi manusia dalam rangka memenuhi kodratnya sebagai manusia.

Sebagai makhluk beradab yang harus menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, setiap manusia memiliki kesetaraan harkat dan martabat di hadapan Tuhan Yang Maha Esa maupun di hadapan hukum (Rukiyati, 2016). Kesetaraan tersebut dapat diwujudkan melalui upaya pemenuhan hak-hak asasi manusia, yakni hak yang berasal dari nilai-nilai dasar kehidupan yang bersifat hakiki dan melekat pada diri setiap manusia sejak lahir (Donnelly, 2019). Upaya pemenuhan hak-hak asasi manusia merupakan salah satu dari sekian upaya yang dilakukan dalam mewujudkan kesetaraan harkat dan martabat, serta menjunjung nilai-nilai kemanusiaan (Davis, 2013). Hak asasi manusia menjadi *core* dalam ide kebebasan setiap individu yang kemudian diterjemahkan menjadi bentuk hak dan harus dinikmati atas dasar nilai kesetaraan dan kemanusiaan.

Studi mengenai hak asasi manusia pada dasarnya berangkat dari teori *natural rights* atau hak kodrati. Hak kodrati merupakan hak yang memberikan ruang dan jalan bagi setiap individu untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan. Hak kodrati yang melekat pada individu bersifat mendasar, tidak boleh dikekang ataupun dicabut oleh institusi tertentu sekalipun itu adalah negara (Sangiuliano, 2014). Justru negara harus dapat menjamin serta melindungi hak dasar setiap individu. Pada sisi lain, hak dasar dari setiap individu harus dilindungi dan dipenuhi oleh otoritas yang sah. Pengakuan hak dasar dari setiap individu harus diatur dan dijabarkan secara detail oleh negara dalam bentuk konstitusi (Hoover, 2013). Tujuannya adalah untuk mendukung upaya dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan, dan kesetaraan, sebagai bentuk keadilan sosial (Donnelly, 2019).

Nilai-nilai kemanusiaan haruslah diwujudkan dalam berbagai kegiatan-kegiatan terorganisir yang dapat menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut tidak bisa jika hanya dilakukan oleh satu individu, melainkan harus ada kerjasama antara individu satu dengan individu yang lain (Amalia, 2021). Bentuk kerjasama yang demikian dapat dilihat dalam organisasi-organisasi yang melandaskan kegiatannya pada nilai kemanusiaan. Seperti organisasi Nahdlatul Wathan yang terletak di daerah Pancor, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Organisasi Nahdlatul Wathan Pancor dirintis dan didirikan pertama kali oleh Tuan Guru Kiai Haji (TGKH) Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Beliau adalah seorang tokoh ulama kharismatis yang berasal dari Lombok Nusa Tenggara Barat dan telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 melalui Keputusan Nomor: 115/TK/Tahun 2017 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan. Organisasi

Nahdlatul Wathan Pancor adalah organisasi yang berasaskan Islam dan kekeluargaan serta memiliki tujuan untuk menyebarkan dakwah Islamiyah khususnya di daerah Nusa Tenggara Barat (Ikroman, 2017). Pada awal mulanya, organisasi ini didirikan sebagai alat untuk mendukung upaya perjuangan melawan kolonialisme Belanda di Indonesia sekaligus sebagai tempat untuk mewujudkan hak masyarakat sekitar agar mereka memperoleh akses pendidikan. Seiring berjalannya waktu, organisasi Nahdlatul Wathan mengalami perkembangan yang dapat dilihat dari bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan, tentunya dalam merefleksikan nilai-nilai kemanusiaan.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai fenomena dan aktivitas yang bersifat alamiah dari pihak yang terlibat (Sukmadinata, 2009) dalam mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan sila ke-2 Pancasila di Organisasi Nahdlatul Wathan Pancor Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilaksanakan di Organisasi Nahdlatul Wathan Pancor NTB dengan subjek penelitian yang ditentukan melalui teknik *purposive*, yakni Pengurus Besar Organisasi Nahdlatul Wathan Pancor, NTB. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, wawancara, dan observasi. Keabsahan data diperiksa menggunakan teknik triangulasi, sedangkan data hasil penelitian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Organisasi Nahdlatul Wathan Pancor merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan, dengan visi dan misi utama untuk fokus pada kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan mendukung proses pembangunan manusia. Organisasi ini tumbuh dan berkembang di bawah kepengasuhan dan kepemimpinan Tuan Guru Kiai Haji (TGKH) Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Organisasi Nahdlatul Wathan pada awalnya didirikan sebagai sarana perjuangan masyarakat Indonesia dalam melawan penjajahan. Terutama saat sang pendiri melihat berbagai praktik penindasan yang terjadi terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak-hak manusia yang kemudian menimbulkan penderitaan mendalam bagi masyarakat Indonesia. Oleh sebab organisasi tersebut dirikan dengan semangat untuk mendukung upaya dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan, dan kesetaraan, sebagai bentuk keadilan sosial (Donnelly, 2019). Upaya tersebut kemudian diwujudkan oleh organisasi Nahdlatul Wathan dengan membuka akses pendidikan yang dimulai dengan mengajarkan syiar-syiar agama Islam pada masyarakat sekitar.

Tujuannya adalah untuk memperkokoh keimanan sekaligus menyatukan masyarakat agar tidak mudah terpecah belah. Kegiatan pendidikan ini masih berlanjut kendati pun Indonesia telah merdeka sampai sekarang.

Sejak awal didirikan, organisasi Nahdlatul Wathan merupakan organisasi yang selalu konsisten bergerak di bidang kemanusiaan sebagai pengamalan sila kedua Pancasila yakni “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Organisasi ini memiliki kepedulian terhadap pemenuhan hak-hak kemanusiaan sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalankan prinsip moral bagi kehidupan (Samho, 2012). Adapun bentuk tanggung jawab ini tidak diwujudkan dalam beberapa bidang kegiatan antara lain bidang pendidikan dan sosial. Hingga saat ini, nilai kemanusiaan dijadikan sebagai salah satu dasar bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pelayanan sosial masyarakat Nusa Tenggara Barat secara khusus dan masyarakat Indonesia secara nasional. Adapun penjelasan mengenai jenis kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Nahdlatul Wathan dalam merefleksikan nilai-nilai kemanusiaan antara lain sebagai berikut.

## **1 Bidang Pendidikan**

Pendidikan secara harfiah merupakan segala proses yang menuntun manusia dalam menggali dan mengembangkan segenap kemampuan, sikap perilaku, dan karakter agar tumbuh menjadi pribadi yang cakap dalam menjalani kehidupan. Pendidikan menurut Driyarkara (Turmuzi, 2021) juga disebut sebagai proses atau kegiatan untuk memanusiakan manusia. Proses memanusiakan manusia bisa berlangsung apabila didukung oleh kebudayaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan proses atau kegiatan pembudayaan manusia.

Pendidikan menjadi sebuah kebutuhan asasi manusia, yang meliputi kegiatan mendidik, melatih dan mengajar. Pendidikan yang baik dilaksanakan secara berkesinambungan dan terpadu, serta tersistem. Sebagai salah satu upaya untuk menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan, pendidikan memberi pendampingan dalam mengoptimalkan perkembangan manusia secara mental, fisik, keterampilan, sikap/perilaku, dan perasaan. Akan tetapi oleh karena faktor-faktor tertentu, tidak setiap masyarakat Indonesia mempunyai akses untuk memperoleh pendidikan. Tentunya ini menjadi persoalan yang genting bagi Indonesia, sebab melalui pendidikanlah setiap individu dapat memberdayakan dirinya untuk mencapai kesetaraan dan memperoleh hal-hal yang berkaitan dengan nilai kemanusiaannya.

Nahdlatul Wathan Pancor merupakan salah satu organisasi yang mendukung proses pendidikan sebagai upaya merefleksikan nilai-nilai kemanusiaan. Upaya tersebut mereka

wujudkan dengan mendirikan beberapa sekolah atau madrasah, yang dimulai dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar (Ibtidaiyah), Sekolah Menengah Pertama (MTs), Sekolah Menengah Atas (MA), dan Perguruan Tinggi. Selain itu, bentuk dukungan lain yang diberikan oleh organisasi tersebut adalah dengan memberikan program bantuan beasiswa pendidikan (dana bi'tsah) bagi siswa yang kurang mampu agar dapat memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan.

## 2 Pendirian Madrasah/Sekolah

Pada masa berdirinya, organisasi Nahdlatul Wathan Pancor memiliki kiprah sebagai salah satu penggerak perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia di bidang pendidikan yang awalnya diwujudkan melalui Pondok Pesantren Al-Mujahidin. Pondok pesantren tersebut terletak di Pancor, Lombok Timurt. Masyarakat sekitar mulai ramai menaruh minat dan kepercayaan pada pondok pesantren tersebut sebagai lembaga pendidikan agama dan tempat belajar putra dan putri mereka. Seiring dengan berkembangnya masyarakat dan meningkatnya kebutuhan manusia, organisasi Nahdlatul Wathan mendirikan sekolah/madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) yang ditujukan khusus bagi siswa putra dan madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah (NBDI) bagi siswa putri. Kedua madrasah tersebut didirikan dengan tujuan untuk menghapus adanya persoalan diskriminasi gender yang berkembang saat itu. Sebab, dalam dunia pendidikan sering kali terjadi bias gender bahwa perempuan dianggap sebagai pihak yang hanya berhak mengerjakan tugas-tugas domestik rumah tangga sedangkan laki-laki dituntut untuk mengenyam pendidikan agar memperoleh kecakapan dalam bekerja (Effendy, 2014). Pada awal mulai berdirinya, NWDI dan NBDI sukses merebut perhatian masyarakat, dibuktikan dengan meluasnya pendirian madrasah menjadi 66 cabang yang tersebar di Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Pendirian madrasah yang tersebar di berbagai daerah di Lombok, Nusa Tenggara Barat, merupakan pencapaian luar biasa bagi Nahdlatul Wathan. Membuka akses pendidikan secara kontinyu menjadi tujuan utama Nahdlatul Wathan Pancor dalam melestarikan nilai-nilai kemanusiaan. Kemanusiaan merupakan esensi dari sifat dasar manusia sekaligus sebagai bentuk identitas manusia karena martabatnya. Upaya memanusiaikan manusia melalui pendidikan ditujukan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan guna mewujudkan kehidupan yang beradab sesuai dengan kodrat dan martabatnya.

Tidak dapat diragukan lagi bagaimana kiprah yang dilakukan oleh Nahdlatul Wathan Pancor dalam memajukan pendidikan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Cabang-cabang madrasah yang didirikan pun telah tersebar dan ditemui di seluruh wilayah di Nusa Tenggara Barat. Pendirian cabang-cabang tersebut tidak terlepas dari visi dan misi yang dimiliki oleh Nahdlatul Wathan Pancor,

yakni “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan”. Seiring dengan laju perkembangan jaman, jumlah madrasah yang didirikan pun mengalami penambahan yang masif.

Hingga saat ini, data yang dapat dihimpun mengenai jumlah keseluruhan madrasah yang berada di bawah naungan Nahdlatul Wathan Pancor, baik dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar (Madrasah Ibtidaiyah) sampai dengan Perguruan Tinggi sudah tersebar di 8 kabupaten dan 1 Kota Madya di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan rincian sebagai berikut: 1) Di Kabupaten Lombok Timur: tingkatan SD/Ibtidaiyah berjumlah 65 madrasah, SMP/MTs berjumlah 66 madrasah, SMA/MA berjumlah 39 madrasah dan perguruan tinggi sebanyak 3; 2) Di Kabupaten Lombok Tengah: tingkatan SD/Ibtidaiyah berjumlah 71 madrasah, SMP/MTs berjumlah 54 madrasah, dan SMA/MA berjumlah 30 madrasah; 3) Di Kabupaten Barat: tingkatan SD/Ibtidaiyah berjumlah 18 madrasah, SMP/MTs berjumlah 16 madrasah, dan SMA/MA berjumlah 11 madrasah; 4) Di Kota Mataram: tingkatan SD/Ibtidaiyah berjumlah 4 madrasah, SMP/MTs berjumlah 3 madrasah, dan SMA/MA berjumlah 1 madrasah; 5) Di Kabupaten Lombok Utara: tingkatan SD/Ibtidaiyah berjumlah 9 madrasah, SMP/MTs berjumlah 8 madrasah, dan SMA/MA berjumlah 6 madrasah; 6) Di Kabupaten Sumbawa: tingkatan SD/Ibtidaiyah berjumlah 4 madrasah, SMP/MTs berjumlah 34 madrasah, dan SMA/MA berjumlah 3 madrasah; 7) Di Kabupaten Dompu: tingkatan SD/Ibtidaiyah berjumlah 3 madrasah, SMP/MTs berjumlah 3 madrasah, dan SMA/MA berjumlah 3 madrasah; 8) Di Kabupaten Bima: hanya ada tingkatan SD/Ibtidaiyah berjumlah 1 madrasah; dan 9) Di Kabupaten Sumbawa Barat: tingkatan SD/Ibtidaiyah berjumlah 1 madrasah, SMP/MTs berjumlah 1 madrasah, dan SMA/MA berjumlah 1 madrasah. Sehingga secara keseluruhan jumlah madrasah dan perguruan tinggi yang tersebar pada 9 kota/kabupaten di Nusa Tenggara Barat adalah sebanyak 426.

Berdasarkan data jumlah madrasah dan perguruan tinggi tersebut, dapat dilihat bahwa organisasi Nahdlatul Wathan Pancor memiliki komitmen yang besar dalam merefleksikan nilai-nilai kemanusiaan di bidang pendidikan. Melalui pendidikan merupakan salah satu upaya bagi organisasi tersebut untuk turut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mengangkat harkat martabat manusia, dan memanusiaikan manusia. Semangat dan kerja keras organisasi Nahdlatul Wathan Pancor merefleksikan nilai-nilai kemanusiaan melalui kegiatan pendidikan ini, terinspirasi dari nasehat sang pendiri yakni Tuan Guru Kiai Haji (TGKH) Muhammad Zainuddin Abdul Madjid.

### **3 Pemberian Program Bantuan Beasiswa (Dana Bi'tsah)**

Manusia sejak dari ia lahir telah memiliki hak untuk mendapatkan akses pendidikan agar dapat tumbuh dan berkembang mencari manfaat bagi dirinya sendiri maupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Setiap manusia berhak dan wajib memperoleh pendidikan berkualitas, namun pada saat ini terdapat banyak sekali persoalan terkait dengan

perkembangan dan pasang surut program pendidikan (Sari & Khoiri, 2023). Sebenarnya sistem pendidikan di Indonesia saat ini masih terkendala oleh beberapa hal, salah satunya yaitu mahalny biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Akibatnya, muncul anggapan keliru dari beberapa kalangan masyarakat bahwa tak ada uang, maka tak ada pendidikan.

Saat ini telah banyak program beasiswa yang diberikan oleh pemerintah dan pihak swasta untuk memberi jaminan bahwa pendidikan merupakan hak setiap manusia dan persoalan biaya tidak lagi menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan. Sebagai organisasi yang juga bergerak dalam bidang pendidikan, Nahdlatul Wathan Pancor pun juga turut mendukung program bantuan beasiswa (dana *bi'tsah*) yang diperuntukan bagi masyarakat sekitar yang kurang mampu. Terutama menysar para kader yang memiliki prestasi akademik dan memiliki kendala dalam biaya pendidikan. Para penerima beasiswa dapat memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi melalui program bantuan beasiswa yang dikelola oleh organisasi tersebut. Beasiswa tersebut diberikan dengan tujuan mendorong dan mencetak masyarakat agar menjadi generasi yang cerdas, sebagai kader penerus Nahdlatul Wathan di kemudian hari.

#### **4 Bidang Sosial**

Selain dalam bidang pendidikan, organisasi Nahdlatul Wathan Pancor merefleksikan nilai kemanusiaan melalui berbagai kegiatan di bidang sosial. Sebab, nilai kemanusiaan pada sila kedua Pancasila juga meletakkan perhatiannya pada dimensi individu dan sosial sebagai sebuah keseimbangan yang tepat (Nurak, G., 2019). Kegiatan sosial dilakukan organisasi tersebut antara lain dengan mendirikan panti asuhan bagi anak-anak terlantar dan anak-anak yang orang tuanya tidak mampu untuk merawat. Kemudian, organisasi Nahdlatul Wathan Pancor juga mendirikan Pusat Kesehatan Pesantren atau lebih dikenal dengan nama Posketren. Pusat kesehatan ini dapat diakses oleh para santri/siswa dan para kader yang membutuhkan pelayanan kesehatan di lingkungan pesantren. Selain itu, refleksi nilai kemanusiaan juga tampak dari didirikannya Koperasi Pondok Pesantren. Koperasi pesantren dapat digunakan oleh para santri/siswa dan para kader yang membutuhkan bantuan modal usaha, atau keperluan lain yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari.

#### **5 Pendirian Panti Asuhan**

Berdasarkan catatan Majelis Kesejahteraan Sosial Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Pancor, jumlah Panti Asuhan yang dimiliki dan dikelola oleh organisasi Nahdlatul Wathan telah tersebar di 4 kabupaten dan 1 kota madya yang ada di Lombok Nusa Tenggara Barat. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: 1) Di Kabupaten Lombok Timur sejumlah 17



panti; 2) Di Kabupaten Lombok Tengah sejumlah 4 panti; 3) Di Kabupaten Lombok Barat sejumlah 3 panti; 4) Di Kabupaten Lombok Utara sejumlah 3 panti; dan 5) Di Kota Mataram sejumlah 1 panti. Sehingga apabila dijumlahkan, panti asuhan yang ada di bawah naungan organisasi Nahdlatul Wathan Pancor sekitar 28 panti.

Secara berkala, panti asuhan dibina secara rutin dengan dukungan moril dan fisik. Selain itu, panti asuhan juga diberi fasilitas untuk membuka akses kerjasama dengan lembaga-lembaga pemberi donasi seperti Dinas Sosial, Departemen Tenaga Kerja, dan Departemen Lainnya. Panti Asuhan yang didirikan oleh Organisasi Nahdlatul Wathan Pancor memiliki tujuan sebagai wadah bagi pemberdayaan anak-anak yatim, fakir miskin dan anak-anak terlantar.

## **6 Pusat Kesehatan Pesantren (Posketren)**

Guna menjamin kesehatan para siswa/santri dan para kader, organisasi Nahdlatul Wathan Pancor mendirikan Posko Kesehatan Pesantren (Poskestren) yang terletak di wilayah Desa Pancor dan Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Pusat kesehatan tersebut telah ada sejak tahun 1988 hingga sekarang. Pusat kesehatan ini didukung oleh tenaga kesehatan yang terampil dalam bidangnya. Selain itu, badan ini mengkoordinir program-program kesehatan seperti posyandu dan Puskesmas (Pusat Kesehatan Panti Asuhan).

## **7 Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren)**

Di bidang ekonomi, organisasi Nahdlatul Wathan Pancor berusaha untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembinaan-pembinaan koperasi yang disebut dengan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren). Saat ini, Kopontren berada di bawah naungan Majelis Ekonomi Nahdlatul Wathan. Kopontren menjalankan fungsinya dalam melakukan pembinaan terhadap usaha kecil-menengah yang dimiliki oleh masyarakat melalui berbagai program pelatihan. Hal ini sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Nahdlatul Wathan Pancor melalui program pemberdayaan ekonomi umat yakni: 1) pemetaan potensi ekonomi umat secara komprehensif dari berbagai potensi jamaah NW di berbagai kota/kabupaten, 2) memfasilitasi kelompok usaha bersama sesuai dengan potensi ekonomi yang diwadahi dalam lembaga koperasi, 3) pendampingan dalam rangka penguasaan lahan melalui mekanisme kemitraan kepada jamaah NW, dan 4) memfasilitasi pengembangan industri rumahan yang ada di tingkat cabang, PAC, dan ranting.

## **SIMPULAN**

Implementasi nilai-nilai kemanusiaan di Organisasi Nahdlatul Wathan Pancor diwujudkan dalam bidang pendidikan dan sosial. Di bidang pendidikan, Nahdlatul Wathan

Refleksi Nilai Kemanusiaan di Organisasi Nahdlatul Wathan Pancor Nusa Tenggara Barat

Pancor pada awalnya mendirikan lembaga pendidikan semi klasik yakni Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah untuk pria dan Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah untuk perempuan. Hingga sampai saat ini dengan perkembangan yang sangat pesat, organisasi tersebut memiliki lembaga pendidikan mulai dari jenjang Pendidikan Dasar sampai Perguruan Tinggi. Adapun bergerak di bidang sosial yakni dengan mendirikan panti asuhan, program bantuan beasiswa (dana bi'tsah) bagi kader berprestasi dan kurang mampu dalam hal biaya pendidikan, mendirikan Posko Kesehatan Pesanteren (Poskestren), dan koperasi pondok pesantren (kopontren) sebagai bentuk kepedulian sosial dan kontribusi nyata organisasi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, dkk. (2021). Peran Serta Warga Negara Muda Pada Kegiatan Kemanusiaan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*.
- Davis, H. (2013). Human rights and civil liberties. In *Human Rights and Civil Liberties*. <https://doi.org/10.4324/9781843924548>
- Donnelly, J. (2019). Universal Human Rights in Theory and Practice. In *Universal Human Rights in Theory and Practice*. <https://doi.org/10.7591/9780801467493>
- Effendy, R. (2014). Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan. *Al-Maiyyah*, 07(2), 142–165.
- Hoover, J. (2013). Towards a politics for human rights: Ambiguous humanity and democratizing rights. *Philosophy and Social Criticism*. <https://doi.org/10.1177/0191453713498390>
- Ikroman, M. N. (2017). *Mengaji Hamzanwadi*. Hamzanwadi Institut.
- Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas dan aktualisasi pancasila*. PT. Gramedia.
- Nurak, G., D. (2019). *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Menurut Pancasila: Tinjauan Etis atas Sila II dari Pancasila*. 26–41. <http://sim.ihdn.ac.id/app-assets/repo/repo-dosen-141909101734-50.pdf#page=181>
- Rukiyati. (2016). *Pancasila*. UNY Press.
- Samho, B. dkk. (2012). *Pancasila Kekuatan Pembebas*. Kanisius.
- Sangiuliano, A. R. (2014). Towards a Natural Law Foundationalist Theory of Universal Human Rights. *Transnational Legal Theory*, 5(2), 218–240. <https://doi.org/10.5235/20414005.5.2.218>
- Sari, D. W., & Khoiri, Q. (2023). Pendidikan untuk Semua: Studi pada Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun. *Journal on Education*, 5(3), 9441–9450. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1757>
- Sukmadinata, N. S. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Turmuzi, M. (2021). Konsep Pendidikan dan Islam Sebagai Alternatif Dalam Memanusiakan Manusia. *AL-ISHLAH Jurnal Pendidikan Islam*.